KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Alokasi Belanja Lain-Lain Membengkak, Pemerintah Harus Transparan ke Publik
Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

RAPBN 2025

Alokasi Belanja Lain-lain Membengkak, Pemerintah Harus Transparan ke Publik

JAKARTA, KOMPAS — Sesuai isi Dokumen Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, porsi belanja lain-lain dalam komponen Belanja Pemerintah Pusat tahun depan adalah Rp 631,8 triliun. Alokasi itu meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Besarnya alokasi belanja lain-lain ini berpotensi menimbulkan risiko banyak pos belanja yang tidak transparan dan tidak diungkap secara detail kepada publik.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2020, realisasi belanja lain-lain hanya Rp 120 triliun. Jumlah itu menurun menjadi Rp 79,7 triliun pada 2021, naik menjadi Rp 404,3 triliun (2022), turun lagi ke Rp 225 triliun (2023), dan Rp 355,4 triliun pada Outlook 2024.

Dalam RAPBN 2025, belanja lain-lain itu bahkan menduduki porsi belanja terbesar di antara komponen belanja pemerintah pusat lainnya. Alokasinya mencapai 23,5 persen dari total alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang Rp 2.693,2 triliun.

Belanja lain-lain itu melebihi belanja modal yang hanya Rp 190,6 triliun, belanja pegawai Rp 513,2 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp 152,6 triliun. Bahkan, melampaui pembayaran bunga utang yang tiga tahun terakhir ini paling tinggi dalam belanja pemerintah pusat dan dialokasikan Rp 552,8 triliun dalam RAPBN 2025.

Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025 tidak menjelaskan secara rinci jenis kebutuhan apa saja yang dicakup dalam pos belanja lain-lain tersebut. Namun, mengutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, belanja lain-lain umumnya dialokasikan untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Saat dihubungi, Kepala Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menjelaskan, belanja lain-lain digunakan untuk kebutuhan pembayaran kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Setiap tahun, pemerintah membayarkan kompensasi kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyediakan pasokan energi yang terjangkau bagi masyarakat.

Ada pula kebutuhan anggaran cadangan, seperti untuk pangan, bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya yang diperkirakan bisa terjadi dalam tahun anggaran berjalan. Dalam RAPBN 2025, jumlah alokasi untuk belanja lain-lain memang meningkat signifikan. Tujuannya untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Berhubung saat ini masa transisi sehingga itu untuk memberi fleksibilitas bagi pemerintahan baru menjalankan program unggulannya," kata Wahyu. Kamis (22/8/2024).

Menurut anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Dolfie Othniel Frederic, belanja lain-lain selalu ada dalam setiap APBN. Pos tersebut biasanya untuk cadangan bencana, pembayaran realisasi kompensasi BBM dan listrik, serta cadangan untuk keperluan tertentu.

Kendati demikian, porsi anggarannya yang melonjak signifikan di RAPBN 2025 turut menjadi perhatian DPR. Menurut Dolfie, DPR akan mengawal ketat penggunaan belanja lain-lain itu dalam pembahasan RAPBN bersama pemerintah selama 1,5 bulan ke depan. RAPBN 2025 akan mulai dibahas bersama mulai 27 Agustus 2024 sampai September 2024 sebelum pemerintahan resmi berganti pada Oktober 2024.

"Untuk mengawalnya, DPR bisa mencantumkan syarat dan ketentuan bahwa penggunaan belanja lain-lain kelak mesti tetap mengakui hak *budget* DPR," kata Dolfie.

Ruang abu-abu

Direktur Eksekutif Center of Law and Economics Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai belanja lain-lain yang jumlahnya besar itu tidak wajar karena menimbulkan risiko banyak pos belanja yang tidak transparan dan tidak diungkap detail kepada publik.

"Dari sisi transparansi ini bisa jadi masalah karena ada program yang sebelumnya tidak disiapkan, kemudian atas nama urgensi dikeluarkan dengan cepat. Padahal, efektivitas program mestinya diukur dulu sebelum masuk pagu APBN," kata Bhima.

Idealnya, belanja lain-lain di bawah 10 persen dari total BPP. Alokasinya bisa dinaikkan dengan syarat ada situasi darurat yang diproyeksikan terjadi sehingga membutuhkan belanja yang cepat dan segera.

Belanja lain-lain yang sangat besar itu akhirnya membuat ruang fiskal untuk belanja modal yang produktif, serta belanja bantuan sosial dan subsidi yang ditujukan untuk rakyat, ikut turun, bahkan menjadi yang terendah sejak pandemi.

"Kalau tujuannya mau menyiapkan ruang anggaran untuk pemerintahan Prabowo, mestinya tidak perlu jadi pagu belanja lain-lain. Hanya di era pemerintahan Jokowi saja ada lonjakan belanja lain-lain yang setinggi ini untuk menyamarkan program pemerintahan berikutnya," ucap Bhima.

Mesti terbuka

Ekonom senior, Faisal Basri, menilai belanja lain-lain yang sangat besar itu muncul untuk menciptakan ruang fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Namun, celah itu justru berpotensi menjadi ruang abu-abu yang mengganggu transparansi dan akuntabilitas APBN. Apalagi, jika penetapan peruntukannya nanti tidak diungkap terbuka kepada publik.

"Mungkin tujuannya agar lebih fleksibel sebab belanja lain-lain itu, kan, sudah satu gepok. Penggunaan dan alokasinya buat apa nanti tinggal diatur. Tetapi, menurut saya, ini tidak sehat. Bisa mengganggu akuntabilitas. Atas nama fleksibilitas tetapi penetapannya nanti bisa saja suka-suka. Apalagi porsinya sampai 20 persen," ujar Faisal.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menduga anggaran belanja lain-lain yang sangat besar itu juga "dicadangkan" untuk berbagai kebutuhan belanja strategis. Hal itu antara lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meski nilai anggarannya Rp 71 triliun tetapi belum ditetapkan kementerian/lembaga yang menjalankan.

Selain itu, ada pula kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dalam RAPBN 2025 baru dianggarkan Rp 143,1 miliar, tetapi masih mungkin bertambah seiring dengan bergulirnya pembahasan RAPBN.

"Kalau di kerja-kerja panitia, belanja lain-lain itu semestinya hanya 2,5 persen dari total belanja. Kalau ini, tidak jelas, karena ini negara, bukan panitia. Makanya mesti jelas, yang dimaksud belanja lain-lain itu apa saja," ujar Awalil.

(AGE)